

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini ISSN 2301-9905 Volume 11, No. 2, Januari 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan- Universitas Muhammadiyah Tangerang

Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten

¹Busron, ²Titi Rachmi

¹Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Banten, ²Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

e-mail: 1busron ibnurasim@yahoo.co.id, 2titirachmi1985@gmail.com

Abstrak

Akreditasi pada Satuan PAUD merupakan kegiatan menilai kelayakan program dan satuan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang dalam hal ini mengacu pada Permendikbud nomor 137 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Harapan dari adanya akreditasi pada satuan PAUD yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu hasil dari kegiatan akreditasi PAUD perlu dianalisis dan dapat bermanfaat untuk merekomendasikan perbaikan bagi pemerintah daerah, khusunya dalam rangka pembinaan satuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat (1) bagaimana analisis capaian standar hasil akreditasi pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan (2) bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil akreditasi dalam menentukan program dan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Banten. Data sekunder bersumber dari website Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF, Referensi Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) capaian rata-rata standar hasil akreditasi PAUD di Provinsi Banten tahun 2019 tertinggi pada standar penilaian pendidikan sebesar 91,04%, sedangkan rata-rata capaian terendah pada standar isi sebesar 60,80% dan (2) hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Kata kunci : Akreditasi PAUD, Analisis Capaian Standar, Pemanfaatan Hasil

Pengantar

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan

semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Artinya, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terdapat pada peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Usaha pemerintah untuk mengembangkan SDM melalui satuan PAUD telah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD. Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Akreditasi PAUD dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran

dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi beserta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD digunakan untuk evaluasi diri dan setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal. Pada tahun 2019 BAN PAUD dan PNF secara resmi menggunakan instrumen terbaru yaitu instrumen akreditasi 2019 yang merupakan penyempurnaan dari instrumen akreditasi sebelumnya. Sistem penilaian akreditasi menggunakan aplikasi berbasis web yang disebut dengan istilah SISPENA versi 2.0. Orientasi penilaian pada aplikasi ini yaitu menitikberatkan pada satuan dan performance (kinerja satuan).

Harapannya dari hasil akreditasi ini menjadi referensi atau acuan bagi pemerintah daerah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD). Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian publik dapat melakukan pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan berdasarkan mutu yang diinginkan.

Metode

Sumber data penelitian ini adalah gabungan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Banten. Data sekunder berasal, antara lain dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF, Referensi Data Pendidikan dari Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud dan informasi yang didapat dari berbagai media serta dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Analisis yang digunakan adalah meta-analysis dengan fokus pada 2 (dua) variabel, yaitu analisis capaian standar akreditasi dan pemanfaatan hasil akreditasi PAUD, terkait variabel analisis capaian standar akreditasi dilakukan analisa dari capaian delapan standar hasil akreditasi seluruh satuan PAUD yang diproses akreditasi Tahun 2019 berjumlah 1069 satuan, kemudian dijumlah dan dirata-ratakan setiap standar per kabupaten/kota, sehingga diketahui rata-rata capaiannya baik kategori terendah, sedang maupun yang tertinggi. Sedangkan variabel pemanfaatan hasil akreditasi diukur, antara lain dari program yang

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan tindak lajut lainnya yang terkait dengan akreditasi PAUD.

Untuk dapat melakukan meta-analysis yang memiliki keakuratan data dan informasi diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi terhadap berbagai studi atau dokumen terkait agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian (Cooper, 2010).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Sebaran dan Capaian Standar

Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi Banten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tahun 2018 proses akreditasi menggunakan sistem penilaian akreditasi secara online (SISPENA), namun dengan tetap menggunakan instrumen Tahun 2014. Pada Tahun 2019 beralih ke SISPENA 2.0 (penyempurnaan dari SISPENA sebelumnya) dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Tahun 2019, yang berbasis satuan dan beorientasi pada penilaian kinerja (performance). Setiap tahun jumlah program/satuan PAUD PNF yang melakukan akreditasi di Povinsi Banten selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 350 Pogram, tahun 2017 sebanyak 300 Program, tahun 2018 sebanyak 577 Satuan dan pada tahun 2019 ini sebanyak 1.125 satuan. Secara khusus untuk jumlah Satuan PAUD yang mengikuti dan diproses akreditasi tahun 2019 berjumlah 1069 Satuan tersebar di delapan Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten, dengan rincian sebaran pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Hasil Akreditasi PAUD Kabupaten/Kota Provinsi Banten

	Akreditasi							
		A	В	C	TT	Total		
PAUD		92	496	481	0	1069		
	Kab. Lebak	1	57	67	0	125		
	Kab. Pandeglang	5	56	70	0	131		
	Kab. Serang	6	87	177	0	269		
	Kab. Tangerang	14	110	69	0	184		
	Kota Cilegon	9	50	16	0	75		
	Kota Serang	4	24	64	0	92		
	Kota Tangerang	32	82	14	0	128		
	Kota Tangerang Selatan	21	39	5	0	65		

Berdasarkan rekapitulasi dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peringkat akreditasi satuan PAUD Provinsi Banten pada tahun 2019 didominasi nilai B dengan jumlah 496 Satuan dan yang paling sedikit peringkat A berjumlah 92 Satuan PAUD. Adapun capaian tertinggi dan terendah tiap Kabupaten/Kota untuk rumpun PAUD adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lebak

Satuan PAUD di Kabupaten Lebak yang sudah terakreditasi sebanyak 125 satuan. Programnya terdiri dari 61 KB, 11 RA, 1 SPS, 53 TK dan 0 TPA. Satuan PAUD yang mendapatkan peringkat A sebanyak 1 satuan yaitu TK Teratai. Yang mendapatkan peringkat B sebanyak 57 satuan, peringkat C sebanyak 67 satuan dan tidak ada satuan PAUD yang TT (Tidak Terakreditasi).

2. Kabupaten Pandeglang

Di Kabupaten Pandeglang PAUD yang sudah diakreditasi tahun 2019 sebanyak 131 satuan, dengan rincian program sebagai berikut: 65 KB, 7 RA, 53 TK dan 6 SPS. PAUD yang mendapatkan peringkat A sebanyak 5 satuan. Peringkat B sebanyak 56 satuan dan yang mendapatkan peringkat C sebanyak 70 satuan.

3. Kabupaten Serang

Satuan PAUD di Kabupaten Serang yang sudah terakreditasi sebanyak 269 satuan. Programnya 170 KB, 31 RA, 43 SPS, dan 25 TK. Satuan PAUD yang mendapatkan nilai A sebanyak 6 satuan, mendapatkan nilai B 87 satuan, mendapatkan nilai C 177 satuan, dan tidak ada satuan yang mendapatkan hasil akreditasi TT (Tidak Terakreditasi).

4. Kabupaten Tangerang

Satuan PAUD di Kabupaten Tangerang yang sudah terakreditasi sebanyak 184 Satuan, Programnya terdiri dari 59 KB, 28 RA, 8 SPS, 89 TK. untuk yang mendapatkan peringkat A sebanyak 14 Satuan, lalu peringkat B sebanyak 101 Satuan, yang mendapat peringkat C sebanyak 69 Satuan dan tidak ada Satuan PAUD yang mendapat peringkat TT (tidak terakreditasi).

5. Kota Cilegon

Satuan PAUD di Kota Cilegon yang sudah terakreditasi sebanyak 75 satuan. Programnya terdiri dari 27 KB, 4 RA, 6 SPS, dan 38 TK. Satuan PAUD yang mendapatkan nilai A sebanyak 9 satuan, mendapatkan nilai B sebanyak 50 satuan, mendapatkan nilai C sebanyak 16 satuan dan tidak ada Satuan PAUD yang mendapat peringkat TT (tidak terakreditasi).

6. Kota Serang

PAUD yang sudah diakreditasi tahun 2019 di Kota Serang sebanyak 86 satuan, dengan rincian program sebagai berikut 59 KB, 18 SPS, dan 16 TK. Peringkat akreditasi terdiri dari 4 satuan mendapat peringkat A, 24 satuan mendapat peringkat B, dan 64 satuan mendapat peringkat C dan tidak ada Satuan PAUD yang mendapat peringkat TT (tidak terakreditasi).

7. Kota Tangerang

Satuan PAUD di Kota Tangerang yang sudah terakreditasi sebanyak 128 satuan. Programnya terdiri dari 13 KB, 6 RA, 8 SPS, 100 TK dan 1 TPA. Satuan PAUD yang mendapatkan peringkat A sebanyak 32 satuan. Yang mendapatkan peringkat B sebanyak 82 satuan, peringkat C sebanyak 14 satuan dan tidak ada satuan PAUD yang TT (Tidak Terakreditasi).

8. Kota Tangerang selatan

Satuan PAUD yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang sudah terakreditasi sebanyak 65 satuan. Untuk programnya terdiri dari 9 KB, 8 RA, dan 48 TK. Satuan PAUD yang mendapatkan peringkat A sebanyak 21 satuan, peringkat B sebanyak 39 satuan dan peringkat C sebanyak 5 satuan dan tidak ada satuan PAUD yang TT (Tidak Terakreditasi).

Sedangkan untuk capaian rata-rata masing-masing setiap standar untuk satuan PAUD yang telah diakreditasi tahun 2019 di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Capaian Standar Akreditasi PAUD berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini

Kabupaten/Kota	St1	St2	St3	St4	St5	St6	St7	St8
Kabupaten Lebak	58,50	53,55	58,11	74,32	65,30	57,45	84,46	91,46
Kabupaten	63,42	58,98	65,23	78,20	69,40	57,95	72,81	87,70
Pandeglang								
Kabupaten Serang	60,81	59,94	55,81	75,33	68,59	58,71	68,73	87,49
Kabupaten	68,33	58,92	61,60	77,12	68,99	63,22	82,90	91,44
Tangerang								
Kota Cilegon	65,64	62,67	73,60	82,37	73,11	74,00	81,08	92,67
Kota Serang	63,74	55,43	53,04	76,33	69,02	64,67	66,85	85,33
Kota Tangerang	73,53	66,93	78,43	86,35	78,48	69,84	84,65	96,06
Kota Tangerang	73,45	70,00	75,08	81,71	77,44	82,31	93,85	96,15
Selatan								
Provinsi Banten	65,93	60,80	65,11	78,97	71,29	66,02	79,41	91,04

(sumber: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena, 02-12-2019)

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa capaian tertinggi Provinsi Banten adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) dengan rata- rata capaian sebesar 91,04%. Sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) dengan rata-rata capaian sebesar 60,80%.

Adapun capaian tertinggi dan terendah tiap Kabupaten/Kota untuk rumpun PAUD adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lebak

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kabupaten Lebak adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 87,70%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar isi) sebesar 53,55%.

2. Kabupaten Pandeglang

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kabupaten Pandeglang adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 88,94%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 6 (Standar Pengelolaan) sebesar 57,95%.

3. Kabupaten Serang

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kabupaten Serang adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 87,49%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 3 (Standar Proses) sebesar 55,81%.

4. Kabupaten Tangerang

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kabupaten Tangerang adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 91,44%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) sebesar 58,92%.

5. Kota Cilegon

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kota Cilegon adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 92,19%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) sebesar 63,28%.

6. Kota Serang

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kota Serang adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 92,67%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 3 (Standar Proses) sebesar 53,04%.

7. Kota Tangerang

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kota Tangerang adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 96,06%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) sebesar 66,93%.

8. Kota Tangerang Selatan

Terlihat bahwa capaian tertinggi di Kota Tangerang Selatan adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) sebesar 96,15%, sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) sebesar 60,80%.

B. Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD

Pemanfaatan hasil akreditasi antara lain ditujukan untuk memetakan mutu pendidikan, khususnya dikaitkan dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang pada tahap selanjutnya digunakan untuk menetapkan program-program intervensi, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, akreditasi yang dilakukan akan bermuara pada status akreditasi. Agar hasil akreditasi dapat dimanfaatkan dengan baik, kebijakan dan prosedur akreditasi termasuk langkah-langkah untuk menetapkan kebijakan atau programprogram intervensi harus ditulis secara jelas dan dikomunikasikan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (Singh, 2007). hasil akreditasi setidaknya dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan mutu satuan/lembaga dan rencana pengembangannya (Subagya, 2009). Hasil wawancara terhadap Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Banten menunjukkan bahwa dari delapan pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Banten, ada beberapa daerah yang berupaya mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan akreditasi seperti : Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang telah mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan pemetaan mutu dan kegiatan pendampingan akreditasi satuan PAUD sekitar 250 Satuan PAUD, kegiatan pengembnagan kurikulum PAUD sekitar 200 Satuan dan memberikan bantuan sarana laptop secara bertahap bagi Satuan PAUD yang sudah terakreditasi. Adapun Kabupaten Serang dan Kota Serang berupaya melakukan kerjasama dengan direktorat pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas dalam program re akreditasi Satuan PAUD (sebelum tahun 2016 sudah terakreditasi C) sebanyak 80 Satuan PAUD (masing-masing 40 Satuan). Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya belum melakukan, baru hanya sebatas secara mandiri/sukarela melakukan pembinaan kepada Satuan PAUD melalui para penilik, pengawas dan organisasi mitra.

Kesimpulan

Pada tahun 2019 Satuan PAUD yang diproses akreditasi berjumlah 1069 satuan yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota. Mayoritas hasil akreditasi adalah terakreditasi B yang terkonsentrasi pada satuan PAUD yaitu sebanyak 496 Satuan. Jumlah satuan PAUD yang diakreditasi sebagian besar berada di Kabupaten Serang, yaitu sebanyak 269 satuan. Akreditasi pada satuan PAUD didominasi oleh program Kelompok Bermain (KB),

dengan sebagian besar terakreditasi C. Secara umum rata-rata capaian standar akreditasi Provinsi Banten pada satuan PAUD berada di kisaran 72,71%, dengan rata-rata capaian tertinggi adalah Standar 8 (Standar Penilaian Pendidikan) dengan rata- rata capaian sebesar 91,04%. Sedangkan capaian terendah adalah Standar 2 (Standar Isi) dengan rata-rata capaian sebesar 60,80%. Dari hasil akreditasi Satuan PAUD pada tahun 2019, di harapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan dan program terkait pembinaan pada Satuan PAUD, sebagai berikut : Kabupaten Lebak untuk satuan PAUD memprioritaskan pada standar isi, standar proses dan standar pengelolaan, Kabupaten Pandeglang untuk memprioritaskan pada standar isi, STPPA dan standar pengelolaan, Kabupaten Serang untuk memprioritaskan pada standar isi, standar proses dan standar pengelolaan, Kabupaten Tangerang untuk memprioritaskan pada standar isi, standar proses dan standar pengelolaan, Kota Cilegon untuk memprioritaskan pada standar isi, STPPA dan standar sarana prasarana, Kota Serang untuk memprioritaskan pada standar isi, standar proses dan STPPA, Kota Tangerang untuk memprioritaskan pada standar isi, standar pengelolaan dan STPPA, Kota Tangerang Selatan untuk memprioritaskan pada standar isi, STPPA dan standar proses.

Daftar Acuan

- Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. 2018. *Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF.
- Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Banten. 2019. *Profil Hasil Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Banten*. Banten: Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Banten.
- Cooper, Harris. 2010. Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Ceria"

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Singh, Mala. 2007. "The Governance of Accreditation" dalam GUNI (ed.). Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? Basingstoke: Palgrave Macmillan.